

TAJUK RENCANA

Mengerem Penyebaran Covid-19

JUMLAH warga terpapar virus Korona masih terus bertambah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Secara nasional, sampai Rabu (16/9) bertambah 3.963 orang. Sedang di tingkat lokal DIY, perkembangan penularan Covid-19 di DIY terus mengalami peningkatan. Hasil pemeriksaan laboratorium, jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat tambahan 48 kasus. Sehingga total kasus positif di DIY menjadi sebanyak 1.943 kasus. Tambahan kasus positif baru tercatat sebagai kasus 1.901 sampai dengan kasus 1.948.

Penambahan kasus tersebut antara lain adanya empat anggota DPRD DIY terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes swab pertama bagi 32 anggota DPRD DIY yang hasilnya keluar pada Selasa (15/9). Sedang tes swab kedua untuk 22 anggota DPRD lainnya, sampai kemarin siang belum keluar. Sehingga belum diketahui apakah jumlah wakil rakyat yang terkonfirmasi positif bertambah atau tidak. Harapannya, tidak bertambah.

Dari berita ini terlihat, adanya anggota dewan terkonfirmasi positif Covid-19 diketahui setelah dilakukan tes swab. Artinya, kalau tidak dilakukan tes swab tidak diketahui kalau ada anggota legislatif yang positif Covid-19. Selanjutnya, ke empat orang itu berpotensi akan menularkan Covid-19 ke teman-teman sekantornya, juga ke keluarganya serta ke masyarakat jika melakukan kegiatan sosial atau tugas partai/tugas legislasi.

Untuk mengetahui dari mana ke empat wakil rakyat tersebut tertular Covid-19, tentu saja mesti dilakukan tracing. Dengan begitu bisa dirunut asal muasalnya, sekaligus dilakukan tindakan yang sesuai serta siapa saja yang kemungkinan tertular.

Selain itu, untuk mengetahui kondisi sebenarnya masyarakat kita, kiranya perlu digencarkan rapid tes maupun tes swab. Sebab konon, kasus Covid-19

ibaratnya gunung es, yang tampak di permukaan tidak sebanyak yang ada di bawah permukaan. Hal ini perlu dilakukan, terutama di perkantoran yang jumlahnya banyak dan berpotensi menjadi klaster baru. Tidak perlu menunggu adanya orang yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan digencarkannya rapid tes dan tes swab, risikonya memang akan semakin muncul banyak kasus positif Covid-19. Masalah hal itu tidak apa-apa, sebab bisa cepat dilakukan penanganan secara tepat. Untuk itu semua tentu saja diperlukan biaya yang tidak sedikit. Masalah ini perlu menjadi perhatian bersama.

Adanya peningkatan kasus positif Covid-19 di DIY juga mesti menjadi perhatian bersama. Kita semua meski mengevaluasi diri sendiri. Antara lain apakah sudah menerapkan disiplin protokol kesehatan. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar, misalnya tidak memakai masker menyapu atau membersihkan sungai, jadi pelajaran bagi mereka yang belum terkena sanksi. Dan masih banyak lagi yang perlu dievaluasi.

Pendek kata, kita semua mestinya bersama-sama berupaya mengerem laju pertumbuhan penyebaran Covid-19. Apalagi musuh bersama kita saat ini sangat kecil dan tidak kelihatan. Kita tidak tahu siapa yang sudah membawa maupun yang belum. Karena itu, tidak terkecuali siapapun, semua harus memulai dari diri sendiri dan mestinya tidak perlu sampai mendapat sanksi karena melanggar protokol kesehatan. Sebab, sebenarnya semua itu menyangkut kehidupan kita semua. Kalau kita sehat semua maka akan bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik.

Semoga saja, upaya kita secara lahir maupun batin dalam mengatasi virus Korona ini segera membuahkan hasil dan kehidupan kita bisa kembali betul-betul normal seperti sedia kala dulu. □

Jalan Berliku Satu Data Kependudukan

DATA adalah aset bangsa. Saat ini kebutuhan akan data terus meningkat. Data yang akurat, *up to date* dan berkualitas sangat vital sebagai basis data dalam perencanaan pembangunan. Termasuk mengambil kebijakan serta implementasi program pembangunan nasional. Yang muara akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Hingga saat ini masih terdapat perbedaan mendasar antara data kependudukan yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan data kependudukan dari BPS. Perbedaan yang ada disebabkan metode pengumpulan data yang digunakan berbeda. Masing-masing data memiliki kelemahan dan keunggulan yang harus dipahami pengguna data.

Data kependudukan BPS berasal dari sensus penduduk, dikumpulkan melalui pencatatan dengan mendatangi setiap penduduk berdasarkan lokasi saat pendataan (*de facto*). Sementara registrasi penduduk (Kemendagri) menggunakan pendekatan administrasi (*de jure*). Penduduk yang aktif melaporkan,

Data statistik kependudukan yang dikumpulkan melalui sensus dilakukan secara menyeluruh sebagai *benchmark* (tolak ukur) data penduduk. Sementara data registrasi dan pencatatan sipil di suatu wilayah hanya mencakup mereka yang secara legal diakui sebagai penduduk (memiliki tempat tinggal yang sah di wilayah tersebut). Adanya persyaratan tempat tinggal yang sah menyebabkan banyak penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap tidak pernah tercatat dalam administrasi kependudukan.

Data statistik kependudukan BPS maupun data registrasi penduduk Kemendagri sama-sama berperan penting dalam mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan nasional. Namun perbedaan versi yang ada telah menimbulkan kerancuan dalam pemanfaatannya. Hal ini yang mendasari perlu dilakukan integrasi data kependudukan untuk mendukung perencanaan

Yulianti

dan pembangunan nasional.

Pandemi

Di tengah badai pandemi yang kian meluas serta gonjang-ganjing perekonomian nasional, pendataan lapangan sensus penduduk 2020 tetap dilangsungkan pada bulan September dengan penerapan ketat protokol kesehatan. Berdasar hasil sensus penduduk online baru sejumlah 51,36 juta orang yang berpartisipasi atau setara dengan 19,05% dari 270 juta penduduk



KR-JOKO SANTOSO

Semangat

Integrasi data kependudukan penting untuk menghindari terjadinya kerancuan pemanfaatan data. Berbagai tantangan tidak mencuitkan semangat para petugas sensus beserta segenap insan statistik berjuang demi mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Di tengah masa krisis ekonomi, pendataan sensus penduduk tetap berlangsung dengan semangat profesional, integritas dan amanah untuk meraih satu tujuan satu data kependudukan yang akurat, *up to date* dan berkualitas. Dukungan pemerintah dari level teratas hingga paling bawah dan segenap masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Demi kesuksesan sensus penduduk 2020. □

*) **Yulianti**, *Statistisi Muda BPS Kabupaten Kulon Progo*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

MESKIPUN di tengah pandemi Covid-19, perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap akan dilaksanakan tahun ini. Pilkada akan dilakukan serentak tanggal 9 Desember 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Termasuk di Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Bantul DIY. Jadwal ini mundur dari rencana semula yang direncanakan dilaksanakan 23 September 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam rakor di Kepatihan Juni lalu memang di DIY siap digelar. Menurutnya, pilkada tidak perlu ditunda lagi karena pemerintah dan pemerintahan harus berjalan normal dari pusat sampai ke daerah. Tantangannya kemudian adalah bagaimana penyelenggaraan pilkada itu dilaksanakan di masa pandemi Covid-19?

Lalu, sejauhmana protokol kesehatan itu diterapkan di dalam tahap-tahap pelaksanaan pilkada? Misalnya pengadaan logistik, rekrutmen dan edukasi kepanitiaan pilkada, konsolidasi dan sosialisasi para calon bupati dan wakil buati, hingga teknis pemilihan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Telah Diatur

Penyelenggaraan pilkada telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Perubahan yang mencolok dari peraturan sebelumnya yaitu Nomor 15 Tahun 2019 terletak pada perlunya penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

Puspito K

dan Wakil Walikota Tahun 2020. Penyesuaian berdasar Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan demikian penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada ini merupakan upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia.

Salah satu aspek dalam protokol kesehatan adalah *social distancing*. Menurut Kementerian Kesehatan, *social distancing* adalah jaga jarak sosial, mengurangi kontak antarwarga. Secara teknis imbauan jaga jarak sosial ini diwujudkan dalam praktik keseharian seperti yang tertulis dalam poster kementerian kesehatan misalnya hindari tempat umum dan pusat keramaian, jaga jarak saat ketemu dengan orang minimal jarak yang dianjurkan adalah 2 meter. Termasuk hindari sementara kegiatan massal, tunda arisan, reuni, kumpul-kumpul dan tidak melakukan sentukan fisik saat bertemu seperti salaman, cium pipi dan berpelukan.

Sementara, penyelenggaraan pilkada tidak bisa menghindari kerumunan orang. Potensi kerumunan itu bisa terjadi pada persiapan, kegiatan kampanye, kegiatan pemilihan di TPS. Bahkan juga debat calon bupati/wakil bupati. Maupun saat konsolidasi calon dengan para pendukungnya.

Tiga Pihak

Dokumen protokol kesehatan telah diatur dalam Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/-MENKES/382/2020 tentang

Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks pilkada, paling tidak, ada tiga pihak yang wajib dilindungi dalam protokol Kesehatan.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Dalam hal ini adalah staf dan pegawai KPU yang menangani penyelenggaraan pilkada. Kedua, panitia pilkada seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketiga, para pemilih yang datang ke TPS, termasuk para pendukung para calon kepala daerah.

Untuk itu, petunjuk teknis protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagai upaya antisipasi agar kegiatan pilkada serentak, tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia. □

*) **Puspito K**, *Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik UGM*

Pojok KR

Pembentukan Pam Swakarsa dipertanyakan. -- **Jangan sampai menjadi kontra produktif.**

DPR ingatkan dampak negatif pembelajaran daring. -- **Perlu diiringi solusi kongkrit.**

Polres Magelang perlu diberi 45 pohon ganja. -- **Masyarakat amkan diberi tahu wujud pohon ini.**

Berabe

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax: (0274) 563125 Telp: (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotocopy atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

'Pernikahan Massal' Sekolah dengan Iduka

LONTARAN gagasan dari Mendikbud Nabeli Makarim, bahwa tindak lanjut dari Inpres No 9 Tahun 2016, tentang revitalisasi SMK, harus melakukan gerakan 'pernikahan massal' antara SMK dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (Iduka). Dalam rangka gerakan 'pernikahan massal' harus diteleah dahulu jumlah sekolah, jumlah siswa dan jumlah Iduka yang ada di sekitar sekolah minimal satu kabupaten/kota, satu provinsi bahkan nasional serta fasilitas peralatan yang dimiliki sekolah dengan industri.

Gagasan ini perlu difasilitasi oleh pemerintah sebagai penghubung 'pernikahan massal' antara SMK dengan Iduka. Selain sarpras praktik juga SDM guru-guru kejuruan baik keseimbangan rasio jumlah guru kejuruan dengan jumlah siswa. Pemetaan ini harus detail untuk memudahkan kegiatan pembelajaran terutama praktik kejuruan.

Setidaknya hasil 'pernikahan massal' ini menghasilkan tujuh anak. Anak pertama yaitu sinkronisasi kurikulum, sekolah mengikuti kurikulum industri dan pemerintah mencukupi peralatannya. Yang terjadi sekarang adalah sekolah ketinggalan 15 tahun dari industri. Untuk mengajarnya pemerintah dengan programnya menstimulus secara perlahan dengan bantuan peralatan praktik dan proses pembelajaran.

Anak kedua adalah praktik kerja lapangan. Siswa setelah mendapat bekal baik teori maupun praktik diberangkatkan dan diserahkan ke Iduka. Melalui tahapan, pencarian, pembekalan, pemantapan, penyerahan, dimonitoring, sampai pada penarikan dan evaluasi sekolah dengan Iduka. Pemberian nilai terampil atau tidak, kompeten atau tidak adalah hak industri.

Anak ketiga adalah magang guru. Peralatan di industri cenderung *update*, terbarukan, oleh sebab itu guru-guru kejuruan melaksanakannya magang di Iduka

dengan asah keterampilan terbarukan yang nantinya akan mendampingi para siswa untuk praktik sesuai kompetensinya. Guru-guru harus *update* dan *upgrade* diri menyesuaikan peralatan kekinian selalu dinamis, tidak stagnan atau monoton. Makanya disebut guru juga pembelajar.

Anak keempat adalah guru tamu. Pentingnya mendatangkan guru dari Iduka untuk ke sekolah, memberikan kuliah umum, atau khusus sesuai dengan peralatan baru yang dimiliki. Selain mengajari siswa juga sekaligus guru kejuruan menyempang siswa dan guru mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kejuruan.

Anak kelima adalah peminjaman peralatan praktik. Ajang tahunan vokasi adalah lomba kompetensi siswa. Tentu dalam lomba ini menggunakan peralatan yang canggih belum tentu sekolah punya alatnya. Kerja sama yang baik dengan Iduka dan pelatihan di Iduka sangat penting untuk membina kompetensi siswa. Dan menghasilkan produk terbaik, berkualitas untuk memenangkan ajang kompetensi baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Anak keenam adalah rekrutmen. Hasil 'pernikahan massal' sekolah dengan Iduka. Sekolah kejuruan yang baik adalah *link and match*, terhubung dan relevan keahlian kejuruan. Kebutuhan industri terpenuhi dengan lulusan tenaga kompeten dan terampil seperti sikap budaya Iduka 5R: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin.

Anak ketujuh adalah evaluasi SDM lulusan, tenaga terampil, sikap yang baik, kompeten, produktif. Diharapkan, harmonisasi dan kemesraan antara sekolah dengan Iduka berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah memfasilitasi dan memantau kebahagiaan pasangan ini. □

Eko Mulyadi, Guru Fisika SMKN 3 Yogya dan Wakasek Humas.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktor Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percektakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percekatan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Untan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Semarang : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.